



DAMPAK AKSELERASI BELANJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Barkah Kolista Moedy*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta
barkah.moedy@kemenkeu.go.id

Mei Ling

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta
mei.ling@kemenkeu.go.id

*Alamat Korespondensi: barkah.moedy@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

As one of the components of Gross Domestic Product (GDP), government expenditure realized through government consumption is closely related to economic growth. There is a tendency in the government spending pattern that indicates an accumulation in the fourth quarter; thereby, the economic benefits of government spending have not been fully experienced by society. This study examines the importance of acceleration of government spending to encourage economic growth through multiplier effect. This study examines the impact of accelerated government spending—both direct and indirect—, on government consumption and gross fixed capital formation, and then performs a simulation of GDP. The results of this study show that increase in budget allocation and acceleration of budget realization have significant positive impacts on economic growth, with capital expenditure having the greatest impact on economic growth. This research recommends the reformulation of performance indicators of budget implementation (IKPA) by considering the impact of government spending on the economy, refocusing on evaluation of budget execution, and optimization the disbursement plan as policy recommendations to accelerate government spending.

Keywords: acceleration of government spending, economic growth, government consumption, government investment, multiplier effect

ABSTRAK

Sebagai salah satu unsur dalam Pengeluaran Domestik Bruto (PDB), pengeluaran pemerintah yang direalisasikan melalui konsumsi pemerintah memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Terdapat kecenderungan dalam pola belanja pemerintah yang menunjukkan penumpukan di triwulan IV, sehingga manfaat ekonomi dari belanja pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini melihat pentingnya akselerasi belanja pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dampak multiplier. Penelitian ini menguji dampak akselerasi belanja pemerintah, baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung, terhadap konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto, lalu disimulasikan terhadap PDB. Hasil penelitian menunjukkan penambahan alokasi dan akselerasi waktu realisasi belanja pemerintah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan dampak tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh belanja modal. Penelitian ini mengusulkan rekomendasi kebijakan, yang meliputi reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan mempertimbangkan dampak belanja terhadap perekonomian, *refocusing* evaluasi pelaksanaan anggaran, dan optimalisasi Rencana Penarikan Dana.

Kata kunci: akselerasi belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, efek pengganda

KLASIFIKASI JEL: E12, E62, H50, H72

CARA MENGUTIP:

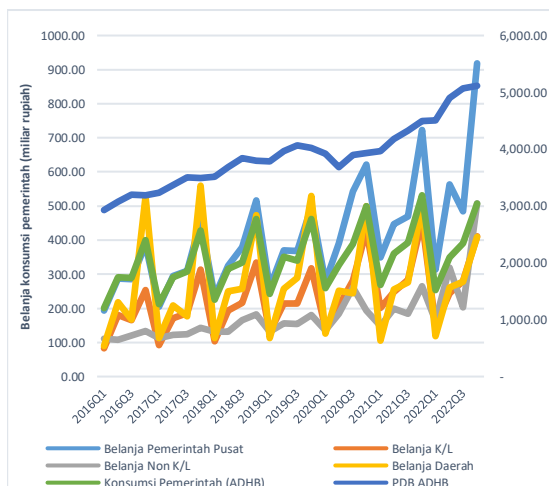
Moedy, B. K. & Ling, M. (2024). Dampak akselerasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 125-140.

PENDAHULUAN

Penyusun kebijakan terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi inklusif jangka panjang. Lahirushan & Gunasekara (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dijaga karena sejalan dengan peningkatan standar hidup, pendapatan negara, dan tingkat pekerjaan. Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi (Jannah, 2020). Pertumbuhan ekonomi salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita (Afriliana & Wahyudi, 2022).

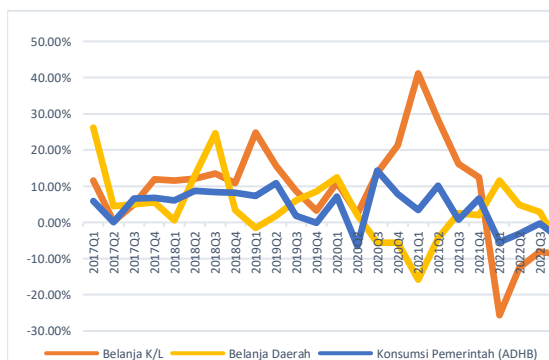
Sebagai dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi, PDB dihitung berdasarkan nilai keseluruhan jumlah produksi pada suatu negara pada jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2022). Sebagai komponen PDB, pengeluaran belanja pemerintah yang direalisasikan melalui

Grafik 1 Realisasi Belanja APBN dan APBD, Konsumsi Pemerintah, dan PDB ADHB Triwulan I 2016 s.d. Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Grafik 2 Pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, dan Konsumsi Pemerintah Triwulan I 2016 s.d. Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Terdapat *multiplier effect* atas konsumsi pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah terhadap perekonomian.
- Penumpukan belanja pemerintah di akhir tahun anggaran menyebabkan *multiplier effect* belum optimal.
- Opsi waktu yang paling optimal untuk akselerasi belanja adalah Triwulan II dan III dan sebaiknya dilakukan pada awal triwulan untuk menghasilkan *multiplier effect* yang lebih besar.
- Diperlukan reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, *refocusing evaluasi pelaksanaan anggaran* dan optimalisasi rencana penarikan dana triwulan, serta penyederhanaan proses perencanaan dan penganggaran.

konsumsi pemerintah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (Hidayat & Nalle, 2017). Dampak pengeluaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya dijelaskan melalui teori Keynesian.

Teori Keynesian menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki peran terhadap perekonomian, baik melalui pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak, maupun keduanya (Dahiri & Nasution, 2017). Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam bentuk kebijakan fiskal, walaupun pengeluaran belanja pemerintah tidak memiliki efek jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat distimulasi oleh peningkatan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Syahputra, 2017).

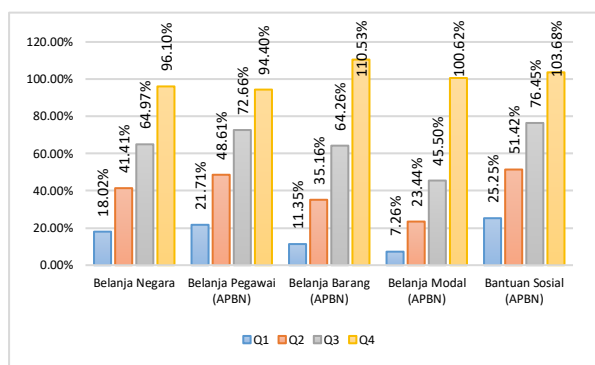
Keynes menyampaikan bahwa perekonomian akan bertumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran belanja pemerintah karena adanya *multiplier effect*, biasa disebut dengan *Keynesian multiplier effect*. Keynesian *multiplier effect* menyiratkan bahwa tambahan pengeluaran belanja pemerintah akan mendorong peningkatan pengeluaran swasta dan akan berdampak lebih besar dari satu-untuk-satu pada PDB (Cwik & Wieland, 2010).

Sebagai pembentuk komponen konsumsi pemerintah, kontribusi pengeluaran belanja pemerintah terhadap perekonomian dipengaruhi oleh pola penyerapan belanja pemerintah. Grafik 1 dan Grafik 2 menggambarkan realisasi dan pertumbuhan belanja kementerian/lembaga yang sejalan dengan konsumsi pemerintah.

Pola realisasi belanja pemerintah pusat triwulanan selama tahun 2016 s.d. 2022 mengindikasikan pola yang sama sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 3, yaitu persentase realisasi yang relatif kecil di Triwulan I, meningkat pada Triwulan II dan III serta mencapai puncaknya

di Triwulan IV. Pola tersebut mengindikasikan adanya penumpukan belanja di Triwulan IV, meski dipengaruhi oleh pola realisasi masing-masing jenis belanja.

Grifik 3 Rata-rata Persentase Realisasi Belanja APBN Triwulan I 2016 s.d. Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Penumpukan belanja disebabkan oleh terhambatnya proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran yang belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), pengadaan barang dan jasa yang belum efektif, serta kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai (Zaenudinsyah, 2016; Alfayuni & Dahtiah, 2021). Penumpukan tersebut menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan mengindikasikan adanya manfaat keekonomian yang belum sepenuhnya dirasakan (Zaenudinsyah, 2016).

Telah banyak penelitian yang dilakukan dalam mengukur dampak pengeluaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, belum banyak penelitian untuk melihat dampak akselerasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pencegahan penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, terutama dalam lingkup Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengukur dampak akselerasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

STUDI LITERATUR

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur dampak pengeluaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Afiftah et al. (2019) menyimpulkan adanya keterkaitan belanja pemerintah di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik sendiri maupun simultan bersama konsumsi rumah tangga. Swaramarinda & Indriani (2011) menyimpulkan bahwa pengeluaran belanja dan investasi pemerintah di Indonesia memiliki keterkaitan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sinulingga (2015) menyatakan hal yang sama, bahwa belanja pemerintah, khususnya belanja modal, mampu menstimulasi perekonomian dan mengurangi

tingkat kemiskinan. Nur & Naldi (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999 sampai 2010 secara signifikan dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan jumlah uang beredar.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2016) melalui pengujian *Impulse Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD) dengan pendekatan *Vector Autoregression* (VAR), menyebutkan bahwa peningkatan pengadaan barang dan jasa melalui belanja pemerintah memiliki dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia, *vice versa*. Sejalan dengan Azwar (2016), Hidayat & Nalle (2017) menjelaskan bahwa adanya dampak positif dan signifikan atas belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang, akan diterima sebagai pemasukan bagi masyarakat dan mendorong daya beli, sehingga menghasilkan efek pengganda. Sabila & Sumarsono (2022) juga menyimpulkan adanya kausalitas positif yang signifikan antara belanja pemerintah terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2015 s.d. 2020, di mana kenaikan belanja pemerintah sebesar Rp1 triliun, akan meningkatkan PDRB sebesar Rp3,11 triliun.

Dalam penelitian pada Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Sri Lanka, India, dan Bhutan pada tahun 1970 s.d. 2013, Lahirushan & Gunasekara (2015) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengeluaran belanja pemerintah. Terdapat temuan juga bahwa pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi belanja pemerintah.

Kesimpulan serupa juga disampaikan oleh Kim et al. (2021). Dalam lingkup Tiongkok, ada dampak positif atas pengeluaran belanja pemerintah terhadap peningkatan ekonomi belanja pemerintah daerah di Tiongkok memberikan dampak lebih tinggi dibandingkan pengeluaran belanja pemerintah pusat atau pajak neto. Namun, belanja pemerintah pusat dan daerah hanya memberikan dampak jangka pendek, sedangkan pajak neto memberikan dampak jangka panjang.

Penelitian oleh Jiranyakul (2007) dengan menggunakan *Vector Autoregression* (VAR) menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Thailand distimulasi oleh peningkatan pengeluaran belanja pemerintah. Hubungan kausalitas antar dua variabel tidak menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), disimpulkan bahwa ada kausalitas positif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian (Jiranyakul, 2007).

Sudarsono (2010) mengemukakan adanya dampak positif yang diberikan oleh pengeluaran belanja pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi

di beberapa negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Iran, Nigeria, dan Tunisia. Sebaliknya, Indonesia, Arab Saudi, Aljazair, Libya, Maroko, Burkina Faso, Benin, dan Malaysia, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi pengeluaran belanja pemerintah.

Secara empiris, terdapat penciptaan efek pengganda pada permintaan agregat dari peningkatan pengeluaran belanja pemerintah. Namun, *output* yang dihasilkan tergantung pada ukuran pengganda pengeluaran belanja yang digunakan (Joy et al., 2021). *Multiplier effect* yang dihasilkan dari pengeluaran belanja pemerintah Amerika Serikat lebih rendah dari 1 atau berada dalam rentang 0,6 - 1,2 (Ramey, 2011). Romer & Bernstein (2009) telah memperkirakan bahwa peningkatan pengeluaran belanja pemerintah Amerika Serikat sebesar 1% dari PDB akan mendorong peningkatan PDB riil sebesar 1,6%.

Sementara itu, Barro (2009) berpendapat bahwa *multiplier effect* yang dihasilkan di Amerika Serikat ketika sedang tidak berada dalam kondisi peperangan mendekati 0. Bagi negara maju, pemanfaatan kapasitas sudah cukup tinggi serta pasar telah berjalan secara efisien. Namun, jika terjadi resesi ekonomi, diperkirakan *multiplier effect* berpotensi lebih tinggi dari 1 (Christiano et al., 2011).

Dalam lingkup Tiongkok, Kim et al. (2021) menjelaskan bahwa *multiplier effect* dari pengeluaran belanja pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan pengeluaran belanja pemerintah pusat dan pajak neto. Namun, *multiplier effect* bersifat fluktuatif mengikuti fase siklus perekonomian, di mana diperkirakan tinggi saat terjadinya resesi.

Belanja Pemerintah

Pemerintah memiliki fungsi pertahanan dan pemeliharaan keamanan internal, penyelenggaraan proses peradilan, serta penyediaan barang-barang publik (Swarmarinda, 2011). Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Pemerintah perlu merealisasikan anggarannya melalui pengeluaran belanja pemerintah. Menurut Tandiawan et al. (2015), pengeluaran belanja pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk mengintervensi perekonomian sebuah negara. Boediono (1998) menyatakan bahwa pengeluaran belanja pemerintah dilakukan untuk (1) Melakukan pembelian barang dan jasa; (2) Membayarkan gaji aparatur sipil negara; serta (3) Menyalurkan *transfer payment*.

Belanja pemerintah pusat direalisasikan berdasarkan APBN, sedangkan belanja pemerintah daerah direalisasikan berdasarkan APBD. Berdasarkan jenisnya, belanja dirinci sebagaimana berikut: 1) belanja pegawai, 2) belanja barang dan jasa, 3) belanja modal, 4) belanja bunga utang, 5)

belanja subsidi, 6) belanja hibah, 7) belanja bantuan sosial, serta 8) belanja lain-lain/tidak terduga.

Produk Domestik Bruto

PDB merupakan sebuah *tools* untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara, utamanya mengukur jumlah keseluruhan pendapatan semua penduduk di dan jumlah keseluruhan pengeluaran untuk barang maupun jasa. Kedua hal tersebut dapat diukur secara bersamaan karena dalam perekonomian secara utuh, jumlah keseluruhan pendapatan harus sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran (Mankiw, 2018).

PDB adalah jumlah seluruh output produksi yang dinilai atas harga pasar pada satu negara dan dalam jangka waktu tertentu. PDB, dinotasikan sebagai Y, berdasarkan pengeluaran, terdiri dari empat komponen, yakni *consumption* (C), *investment* (I), *government consumption* (G), dan *net export* (NX), sebagaimana persamaan berikut (Mankiw, 2018).

$$Y = C + I + G + NX \dots\dots\dots (1)$$

PDB dibagi atas dua konsep harga, yaitu PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mengukur berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut dan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mengukur menggunakan harga pada satu tahun dasar tertentu. Selain itu, PDB juga dapat dihitung melalui pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi (Badan Pusat Statistik, 2022).

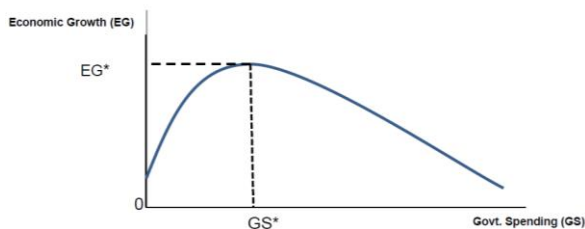
Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat dua teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori Wagner dan teori Keynesian. Adolph Wagner menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi konsumsi pemerintah. Fungsi keamanan dan regulasi pemerintah diperlukan seiring dengan meningkatnya perekonomian. Permintaan barang publik juga akan meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara (Lahirushan & Gunasekara, 2015). Pasaribu & Septriani (2020) juga menambahkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek bernilai besar sulit dimodali dan dilaksanakan oleh sektor privat, sehingga diperlukan dukungan Pemerintah.

Sementara itu, Keynes berpendapat bahwa peningkatan konsumsi pemerintah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal itu didapatinya saat terjadinya *The Great Depression*, di mana penurunan permintaan terjadi karena adanya penurunan konsumsi secara agregat, sehingga Pemerintah perlu mengintervensi perekonomian. Dumairy (1997) menjelaskan bahwa pentingnya campur tangan Pemerintah didasarkan pada persamaan model pendapatan nasional, yaitu peningkatan konsumsi pemerintah akan mendorong kenaikan PDB.

Meski demikian, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kausalitas yang bersifat linier. Murshed et al. (2018) menjelaskan bahwa hubungan tersebut bersifat nonlinier dan tidak bertumbuh tanpa batas. Terdapat satu titik tertentu di mana konsumsi pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal, sebelum penambahannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh *crowding out effect* sektor privat, sebagaimana Murshed et al. (2018) menjelaskannya melalui *Armey Curve* (Gambar 1).

Gambar 1 *Armey Curve*



Sumber: Murshed et al. (2018)

Teori Pengganda Keynesian

Teori pengganda Keynesian mengungkapkan bahwa peningkatan salah satu komponen PDB akan meningkatkan PDB dengan jumlah yang lebih besar. Kebijakan fiskal diperkirakan mampu meningkatkan tingkat permintaan agregat melalui pengeluaran belanja pemerintah dan pengurangan pajak (*tax cuts*). Pendapatan yang dibelanjakan (*disposable income*) Masyarakat akan meningkat dan tingkat konsumsi apabila Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penyaluran *transfer payments* atau mengurangi pajak (*tax cuts*) (Sutawijaya & Lestari, 2013).

Nasir & Sari (2015) menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong PDB melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin tinggi juga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Angka pengganda Keynesian dihitung berdasarkan *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dan *Marginal Propensity to Save* (MPS), dengan formulasi perhitungan *multiplier effect* sebagai berikut:

$$\text{Multiplier effect} = 1/(1-\text{MPC}) \dots\dots\dots (2)$$

Terdapat juga *multiplier effect* dari investasi yaitu *Marginal Propensity to Invest* (MPI). Diasumsikan, bahwa setiap *saving* yang dilakukan merupakan bentuk investasi, sehingga nilai MPS sama dengan MPI. Secara matematis, MPC dan MPS diformulasikan sebagaimana berikut:

$$\text{MPC} + \text{MPS} = 1 \dots\dots\dots (3)$$

Perputaran Uang

Menurut Mishkin (2009), perputaran uang merupakan ukuran aktivitas transaksional dalam

satu negara yang dihitung dari rata-rata jumlah transaksi dalam setahun untuk membeli produk-produk serta diukur dengan satuan mata uang negara tersebut. Indikator tersebut memberi gambaran seberapa sering perpindahan atau penggunaan mata uang dalam kurun waktu tertentu.

Irving Fisher menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang beredar (M) dengan total produksi barang dan jasa pada suatu negara (P x Y) (Fauzukhaq et al., 2019). Perputaran uang dihitung dengan membandingkan antara PDB dan jumlah uang beredar. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dan siap dibeli dimaknai sebagai PDB. Nilai keseluruhan mata uang yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral di lembaga penyimpanan dimaknai sebagai M1. Sementara itu, M2 memiliki makna lebih luas dari jumlah uang beredar suatu negara, yaitu dengan memperhitungkan tabungan, deposito berjangka, dan reksadana. Perputaran uang diformulasikan sebagai berikut (Ginting et al., 2018):

$$V = P \times Y / M \dots\dots\dots (4)$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, yaitu data PDB ADHB dan ADHK triwulanan dari BPS serta realisasi belanja APBN dan APBD triwulanan tahun 2015 s.d. 2022 dari Kementerian Keuangan. Pemilihan penggunaan data mulai tahun 2015 didorong oleh perubahan basis data pada kerangka akuntansi mulai tahun 2015 sejak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, penerapan *Government Finance Statistics* (GFS) tingkat wilayah serta dimulainya program pengembangan dan transformasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara fundamental dan komprehensif mendorong peningkatan kualitas data pemerintah daerah sejak tahun 2015.

Dalam mengukur keterkaitan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menggunakan metode *multiple regression analysis*. Menurut Sugiyono (2018), regresi linear berganda adalah metode regresi untuk mengevaluasi pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear mengasumsikan terdapat hubungan yang linier antara variabel dependen dan setiap variabel independennya (Kartiningrum et al., 2022). Variabel independen merupakan variabel pemberi pengaruh, sedangkan variabel dependen merupakan variabel terpengaruh (Purwadi et al., 2019). Persamaan regresi linear berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 \chi_1 + \beta_2 \chi_2 + \dots + \beta_n \chi_n + \varepsilon \dots \dots \dots (5)$$

y : variabel dependen
 a : konstanta
 b : koefisien regresi
 x : variabel independen
 ε : galat percobaan

Dalam penelitian ini, regresi dilakukan atas dua model. Konsumsi pemerintah (GS) bertindak sebagai variabel dependen dengan variabel independen terdiri dari belanja pegawai APBN (APBN_{Peg}), belanja pegawai APBD (APBD_{Peg}), belanja barang APBN (APBN_{Bar}), belanja barang APBD (APBD_{Bar}), belanja modal APBN (APBN_{Mod}), belanja modal APBD (APBD_{Mod}), belanja bantuan sosial APBN (APBN_{Ban}), dan belanja bantuan sosial APBD (APBD_{Ban}) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya (PNBP_{Lainnya}), PNBP BLU (PNBP_{BLU}), dan retribusi daerah (Retr_{Daerah}) dengan persamaan regresi linear berganda model pertama sebagai berikut:

$$GS = \alpha + \beta_1 APBN_{Peg} + \beta_2 APBN_{Bar} + \beta_3 APBN_{Mod} + \beta_4 APBN_{Ban} - \beta_5 PNBP_{Lainnya} - \beta_6 PNBP_{BLU} + \beta_7 APBD_{Peg} + \beta_8 APBD_{Bar} + \beta_9 APBD_{Mod} + \beta_{10} APBD_{Ban} - \beta_{11} Retr_{Daerah} + \varepsilon \dots \dots \dots (6)$$

Berdasarkan panduan Sistem Neraca Nasional 2008, pengeluaran konsumsi pemerintah ADHB dihitung dari *output* pemerintah dikurangi penjualan barang dan jasa ditambah *social transfer in kind purchased market production*. *Output* Pemerintah dihitung berdasarkan nilai realisasi belanja APBN dan APBD pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dikurangi dengan PNBP lainnya, PNBP BLU, dan retribusi daerah.

Berdasarkan panduan Sistem Neraca Nasional 2008, perhitungan konsumsi pemerintah dari belanja modal diproksikan dari penyusutan aset tetap, dengan rata-rata persentase nilai penyusutan aset tetap sebesar 25% (Badan Pusat Statistik, 2013). Panduan Sistem Neraca Nasional 2008 juga menyebutkan bahwa hanya belanja bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk non kas yang masuk dalam perhitungan pengeluaran konsumsi pemerintah, dengan rata-rata persentase belanja bantuan sosial non kas sebesar 34% dari belanja bantuan sosial (Badan Pusat Statistik, 2013). Penjualan barang dan jasa pemerintah pada penelitian ini dihitung dari PNBP Lainnya, PNBP BLU, dan retribusi daerah, yang berfungsi sebagai pengurang untuk menghitung konsumsi akhir pemerintah.

Pada pemodelan kedua, sesuai dengan Sistem Neraca Nasional 2008, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel dependen yang dihitung dari belanja modal APBN (APBN_{Mod}), belanja modal APBD (APBD_{Mod}), dan investasi korporasi (Corporate) sebagai variabel independen.

Persamaan regresi linear berganda model kedua dinotasikan sebagai berikut:

$$PMTB = \alpha + \beta_1 APBN_{Mod} + \beta_2 APBD_{Mod} + \beta_3 Corporate + \varepsilon \dots \dots \dots (7)$$

Penelitian ini menggunakan kerangka hubungan komponen pembentuk PDB sebagai kerangka analisis, yaitu konsumsi pemerintah dan PMTB merupakan komponen pembentuk PDB. Penambahan pada kedua komponen tersebut akan meningkatkan PDB. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penelitian ini mengukur dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampak langsung atas konsumsi pemerintah dan PMTB, serta dampak tidak langsung melalui *multiplier effect*. Dampak langsung diukur melalui kenaikan pertumbuhan di triwulan berkenaan dan pengurangan pertumbuhan di triwulan berikutnya. Dampak tidak langsung diukur dari dampak lanjutan dengan besaran yang semakin mengecil sampai selesainya siklus perputaran suatu transaksi.

Secara sederhana, *multiplier effect* didapatkan dari peredaran uang atas konsumsi pemerintah yang dibelanjakan pada sektor privat, untuk kemudian akan dibelanjakan lagi sehingga memberikan *multiplier effect*. Dampak terhadap perekonomian ini akan terus berlanjut sampai selesainya siklus suatu transaksi perekonomian. Dalam penelitian ini, perhitungan kurun waktu *multiplier effect* pada suatu siklus transaksi diasumsikan sejalan dengan perputaran uang.

Penelitian ini menguji pentingnya waktu pelaksanaan realisasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang dirumuskan adalah semakin cepat belanja pemerintah direalisasikan, maka akan semakin besar juga dampak yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemodelan

Penyajian nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku hasil pemodelan pertama dituangkan pada Tabel 1. Penyajian tersebut menggunakan metode statistik deskriptif.

Pada regresi linear berganda, pemodelan yang menggunakan estimasi *Ordinary Least Squared* harus memenuhi asumsi klasik agar dapat diterima sebagai *Best Linear Unbiased Estimators*. Telah dilakukan uji asumsi klasik terhadap pemodelan pertama dan tidak ditemukan adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan data berdistribusi normal.

Ghozali (2018) menyampaikan bahwa uji autokorelasi dilakukan dengan Uji *Run Test* untuk mengetahui apakah residual bersifat random atau tidak. Uji autokorelasi dilakukan pada aplikasi IBM SPSS Statistics 26, dengan hipotesis H0 tidak

Tabel 1 Statistik Deskriptif Pemodelan Pertama

Variable	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev	Observations
APBNPeg	90,098	129,88	70,77	14,834	27
APBNBar	60,745	134,89	18,76	34,734	27
APBNMod	11,902	14,79	9,92	1,050	27
APBNBan	18,730	31,55	6,16	7,850	27
PNBPLainnya	22,289	38,61	11,83	6,907	27
PNBPBLU	11,600	28,56	4,68	5,941	27
APBDPeg	97,804	134,90	76,25	15,682	27
APBDBar	61,763	137,02	15,39	35,266	27
APBDMod	13,321	17,73	8,70	1,893	27
APBDBan	2,780	7,95	0,51	1,871	27
RETRDaerah	3,420	10,00	1,24	2,338	27
GS	327,399	498,96	200,76	80,63	27

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023 (data diolah)

Tabel 2 ANOVA Pemodelan Pertama

Source	DF	Sum of Sq.	Mean Sq.	F-Ratio	Prob. Level
Intercept	1	2.894.138	2.894.138		
Model	11	168.638	15.334,82	707,5412	0,00
Residual	15	325,101	21,674		
Total	26	169.008,1	6.500,31		

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023 (data diolah)

Tabel 3 Statistik Deskriptif Pemodelan Kedua

Variable	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev	Observations
APBNMod	42,068	115,83	3,72	32,478	18
APBDMod	55,313	157,22	6,58	51,535	18
Corporate	918,618	1.124,21	722,11	110,230	18
PMTB	1.016,001	1.287,21	803,26	136,396	18

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023 (data diolah)

Tabel 4 ANOVA Pemodelan Kedua

Source	DF	Sum of Sq.	Mean Sq.	F-Ratio	Prob. Level
Intercept	1	18.580.630	18.580.630		
Model	3	313.603,1	104.534,4	549,9806	0,00
Residual	14	2.660,969	190,069		
Total	17	316.264,1	18.603,77		

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023 (data diolah)

terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Jika nilai *asympt. sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari Tabel 5 terlihat bahwa nilai *asympt. sig (2-tailed)* 0,994 lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan model tidak terdapat masalah autokorelasi.

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa untuk menguji heteroskedastisitas pada sebuah pemodelan, digunakan uji glejser, dengan melakukan regresi antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Hipotesis H0 menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dan H1 terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi pada seluruh variabel independen lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat keterkaitan antar variabel independen dalam

sebuah pemodelan regresi (Ghozali, 2018). Salah satu langkah untuk melakukan uji multikolinearitas adalah menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Sriningsih et al. (2018) menjelaskan bahwa gejala multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Dari Tabel 7, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari

Tabel 5 Hasil Uji *Run Test* Pemodelan Pertama

Description	RES
Test Value	-,74
Cases < Test Value	13
Cases >= Test Value	14
Total Cases	27
Number of Runs	15
Z	,007
Asymp. Sig (2-tailed)	,994

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

10, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen terbebas dari multikolinearitas.

Uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Hipotesis H_0 menunjukkan data berdistribusi normal dan H_1 data tidak berdistribusi normal. Jika nilai *asympt. sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dari Tabel 8, terlihat bahwa nilai *asympt. sig (2-tailed)* 0,143 lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan data berdistribusi normal.

Hasil pemodelan pertama membentuk persamaan atas perhitungan dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial APBN maupun APBD serta PNPB lainnya, PNPB BLU, dan retribusi daerah terhadap konsumsi pemerintah sebagai berikut:

$$GS = -27,147 + 0,940APBN_{Peg} + 1,070APBN_{Bar} + 2,477APBN_{Mod} + 1,047APBN_{Ban} - 1,645PNBP_{Lainnya} - 0,860PNBP_{BLU} + 1,146APBD_{Peg} + 0,998APBD_{Bar} + 2,182APBD_{Mod} + 0,975APBD_{Ban} - 0,899Retr_{Daerah} + \epsilon \dots \dots \dots (8)$$

Berdasarkan hasil pemodelan pertama, nilai konstanta adalah -27,147. Artinya, jika variabel independen lainnya bernilai 0, maka konsumsi pemerintah adalah sebesar -27,147. Sementara itu, interpretasi koefisien regresi dapat dijabarkan bahwa peningkatan belanja pegawai APBN sebesar Rp1 triliun akan meningkatkan konsumsi pemerintah sebesar Rp0,94 triliun dan seterusnya. Penelitian ini difokuskan terhadap dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dampak peningkatan PNPB lainnya, PNPB BLU, dan retribusi daerah tidak disimulasikan dan menerapkan asumsi *ceteris paribus*. Dengan melihat taraf signifikansi ANOVA pada Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh seluruh variabel independen secara simultan.

Telah dilakukan uji asumsi klasik terhadap pemodelan kedua. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan data berdistribusi normal.

Pada pemodelan kedua, hipotesis H_0 menunjukkan tidak terdapat autokorelasi dan H_1 terdapat autokorelasi. Jika nilai *asympt. sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dari tabel 9 terlihat bahwa nilai *asympt. sig (2-tailed)* 0,089 lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan model tidak terdapat masalah autokorelasi.

Pada pemodelan kedua, hipotesis H_0 menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dan H_1 jika terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dari tabel 10, diketahui bahwa nilai signifikansi pada seluruh variabel independen lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Glejser Pemodelan Pertama

Variable	t	Sig.
Intercept	-.302	.766
APBN _{Peg}	0.082	.936
APBN _{Bar}	1.143	.271
APBN _{Mod}	-.484	.635
APBN _{Ban}	-.016	.988
PNBP _{Lainnya}	-.674	.510
PNBP _{BLU}	-.758	.460
APBD _{Peg}	.530	.604
APBD _{Bar}	-.570	.577
APBD _{Mod}	-.639	.533
APBD _{Ban}	1.433	.172
RETR _{Daerah}	-.810	.431

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Tabel 7 Hasil Uji Tes Multikolinearitas Pemodelan Pertama

Variable	Coefficient	VIF
Intercept	-27.147	
APBN _{Peg}	0.940	3.076
APBN _{Bar}	1.070	9.849
APBN _{Mod}	2.477	2.069
APBN _{Ban}	1.047	3.163
PNBP _{Lainnya}	-1.645	5.717
PNBP _{BLU}	-0.860	5.802
APBD _{Peg}	1.146	6.115
APBD _{Bar}	0.998	8.695
APBD _{Mod}	2.182	1.918
APBD _{Ban}	0.975	3.014
RETR _{Daerah}	-0.899	4.098

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Tabel 8 Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Pemodelan Pertama

Description	RES
N	27
Normal	Mean
Parameters	Std. Deviation
Most Extreme	Absolute
Differences	Positive
	Negative
Test Statistics	
Asymp. Sig (2-tailed)	

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Dari Tabel 11 diperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Artinya, seluruh variabel independen terbebas dari multikolinearitas.

Pada pemodelan kedua, hipotesis H_0 menunjukkan data berdistribusi normal dan H_1 data tidak berdistribusi normal. Jika nilai *asympt. sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dari tabel 12, terlihat bahwa nilai *asympt. sig (2-tailed)* 0,200 lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan data berdistribusi normal.

Tabel 9 Hasil Uji *Run Test* Pemodelan Kedua

Description	RES
Test Value	-.09
Cases < Test Value	9
Cases >= Test Value	9
Total Cases	18
Number of Runs	6
Z	-1.701
Asymp. Sig (2-tailed)	.089

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Tabel 10 Hasil Uji Glejser Pemodelan Kedua

Variable	t	Sig.
Intercept	0.652	.525
APBNMod	-.156	.879
APBDMod	.494	.629
Corporate	-.169	.868

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Tabel 11 Hasil Uji Tes Multikolinearitas Pemodelan Kedua

Variable	Coefficient	VIF
Intercept	9.879	
APBNMod	1.085	9.963
APBDMod	0.938	9.978
Corporate	0.989	0.991

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Tabel 12 Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Pemodelan Kedua

Description	RES
N	18
Normal	Mean .0000
Parameters	Std. Deviation 1.37476
Most Extreme	Absolute .118
Differences	Positive .118
	Negative -.066
Test Statistics	.118
Asymp. Sig (2-tailed)	.200

Sumber: Olah Data IBM SPSS Statistics 26

Statistik deskriptif hasil pemodelan kedua digambarkan sesuai dengan Tabel 3. Hasil pemodelan kedua membentuk persamaan atas pengaruh belanja modal APBN, belanja modal APBD, dan investasi korporasi terhadap PMTB sebagai berikut:

$$PMTB = 9,879 + 1,085APBN_{Mod} + 0,938APBD_{Mod} + 0,989Corporate + \varepsilon \dots\dots\dots (9)$$

Berdasarkan hasil pemodelan di atas, nilai konstanta menunjukkan angka 9,879. Artinya, jika variabel independen lainnya bernilai 0, maka PMTB sebesar 9,879. Interpretasi koefisien regresi dijabarkan bahwa setiap peningkatan belanja modal APBN dan APBD sebesar Rp1 triliun akan meningkatkan PMTB masing-masing sebesar Rp1,09 triliun dan Rp0,94 triliun. Namun, penelitian

ini difokuskan terhadap belanja pemerintah, sehingga dampak investasi korporasi tidak dilakukan simulasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat taraf signifikansi ANOVA pada Tabel 4, disimpulkan bahwasanya variabel dependen dipengaruhi oleh seluruh variabel independen secara simultan.

Dalam menentukan *multiplier effect* atas konsumsi pada satu kurun waktu tertentu, perhitungan *multiplier effect* diasumsikan sejalan dengan perputaran uang. Perhitungan kecepatan uang beredar ditampilkan pada Tabel 14. Perputaran uang tahun 2022 berkisar pada rentang 1,96 – 2,18 kali per triwulan, dengan rata-rata 2,06 kali, yang dibulatkan menjadi angka absolut 2 kali. Artinya, *multiplier effect* akan memenuhi satu siklus ekonomi sebanyak 2 kali dalam setiap triwulan.

MPC Indonesia pada bulan Januari s.d. Desember 2022 memiliki rentang berfluktuatif dari 73,9% dan 75,6%. Pada periode penelitian, MPC Indonesia sebesar 73,9% menghasilkan nilai pengganda Keynesian atas konsumsi sebesar 3,83. Artinya, setiap Rp1 triliun penambahan konsumsi pemerintah, maka PDB akan meningkat sebesar Rp3,83 triliun.

MPS Indonesia didapatkan sebesar 26,1%, menghasilkan nilai pengganda Keynesian atas investasi sebesar 1,35. Artinya, setiap Rp1 triliun penambahan investasi, maka PDB akan meningkat sebesar Rp1,35 triliun. Berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat diperkirakan *multiplier effect* setiap triwulan sesuai dengan Tabel 15.

Dampak Penambahan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada Triwulan I 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Dampak penambahan belanja sebesar Rp1 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh belanja modal APBN, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07% menjadi 5,09% (yoy). Dampak terendah dihasilkan oleh penambahan Rp1 triliun belanja bantuan sosial APBN dan APBD yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02% menjadi 5,04% (yoy).

Sementara itu, dampak penambahan sebesar 1% belanja pegawai APBD dari realisasi belanja triwulan tersebut merupakan yang tertinggi dan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 mencapai 5,08% (yoy) atau naik 0,06%. Namun, belanja pegawai bersifat statis dan hanya komponen tertentu saja seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang memungkinkan untuk dilakukan pergeseran waktu pelaksanaan secara terbatas. Dampak terendah penambahan sebesar 1% adalah belanja bantuan sosial APBD, yang meningkatkan pertumbuhan

Tabel 13 Dampak Penambahan per Jenis Belanja Sebesar Rp1 triliun terhadap Konsumsi Pemerintah dan PMTB

Jenis Belanja	Dampak ke Konsumsi Pemerintah	Dampak ke PMTB
APBNPeg	0,94	-
APBNBar	1,07	-
APBNMod	0,62	1,09
APBNBan	0,36	-
APBDPeg	1,15	-
APBDBar	1,00	-
APBDMod	0,55	0,94
APBDBan	0,33	-

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Tabel 14 Perputaran Uang Triwulan I s.d. IV 2022

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
JUB (M1) (triliun Rupiah)	2.254,59	2.339,45	2.320,88	2.608,80
PDB ADHB (triliun Rupiah)	4.508,60	4.897,94	5.066,99	5.114,91
Perputaran Uang (kali)	2,00	2,09	2,18	1,96

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2023 (diolah)

Tabel 15 *Multiplier Effect* pada Setiap Triwulan

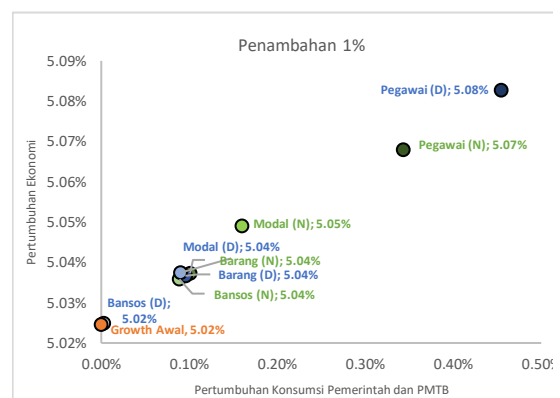
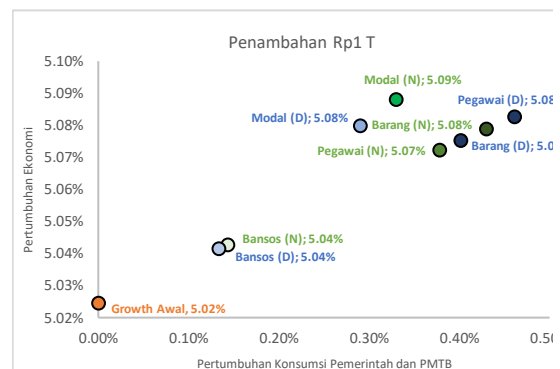
Perputaran	Triwulan	MPC	MPS
Putaran pertama	Triwulan pertama	0,74	0,26
Putaran kedua	Triwulan kedua	0,55	0,07
Putaran ketiga	Triwulan ketiga	0,40	0,02
Putaran keempat	Triwulan keempat	0,30	0,00
Total Multiplier Effect		3,83	1,35

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2023 (diolah)

ekonomi sebesar 0,0004%. Dampak penambahan belanja sebesar Rp1 triliun atau 1% dari belanja pada Triwulan I 2022 terhadap pertumbuhan ekonomi ditampilkan pada Grafik 4.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2022 sebesar 5,46% (yoy), penambahan Rp1 triliun belanja modal APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,52% (yoy) atau naik 0,06%. Sebaliknya, penambahan pada belanja bantuan sosial APBD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,01% ke 5,47% (yoy) dan merupakan dampak terendah.

Grafik 4 Dampak Penambahan per Jenis Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2022



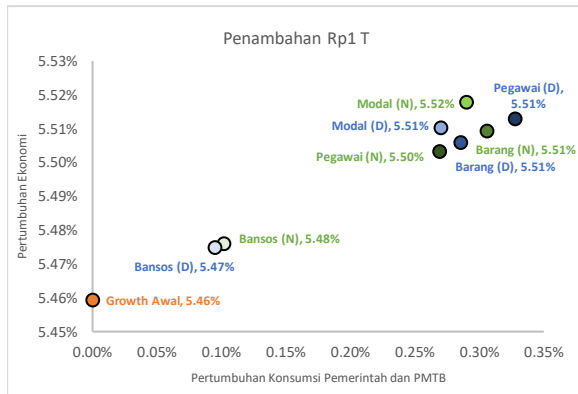
Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Sementara itu, dengan penambahan belanja sebesar 1% dari belanja triwulan tersebut, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi mampu didorong mencapai 5,52% (yoy) oleh belanja pegawai APBN dan 5,46% (yoy) oleh belanja bantuan sosial APBD. Dampak penambahan belanja sebesar Rp1 triliun atau 1% dari belanja pada Triwulan II 2022 terhadap pertumbuhan ekonomi ditampilkan pada Grafik 5.

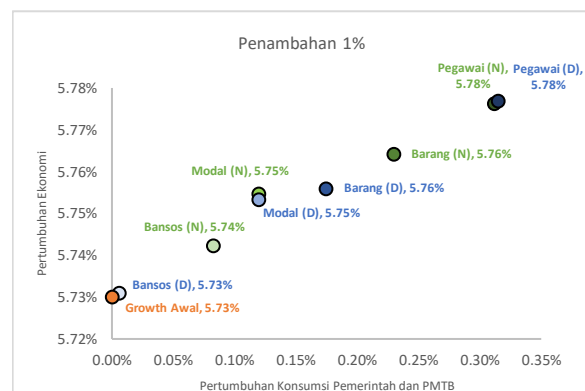
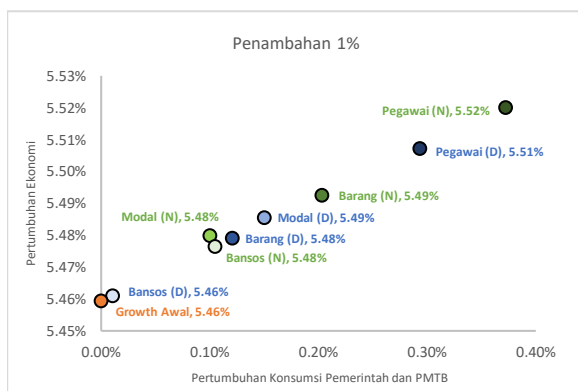
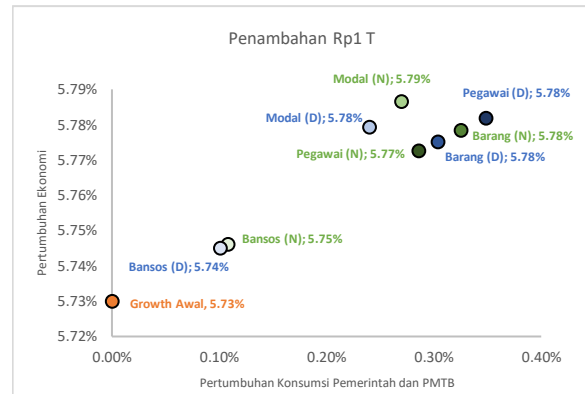
Memasuki triwulan ketiga tahun 2022, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,73% (yoy). Penambahan sebesar Rp1 triliun pada belanja modal APBN akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,79% (yoy) atau naik 0,06%. Dampak terendah diberikan oleh penambahan pada belanja bantuan sosial APBD akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01% ke 5,74% (yoy).

Sementara itu, dengan penambahan belanja sebesar 1% dari belanja triwulan tersebut, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi mampu didorong mencapai 5,78% (yoy) oleh belanja pegawai APBN dan APBD. Sebaliknya, penambahan sebesar 1% belanja bantuan sosial APBD memberikan dampak terendah, yaitu sebesar 0,001%. Dampak penambahan belanja sebesar Rp1 triliun atau 1% dari belanja pada triwulan III 2022

Grafik 5 Dampak Penambahan per Jenis Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022



Grafik 6 Dampak Penambahan per Jenis Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

terhadap pertumbuhan ekonomi ditampilkan pada Grafik 6.

Kinerja perekonomian Indonesia Triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Penambahan belanja modal APBN sebesar Rp1 triliun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 5,07% (yoy). Belanja bantuan sosial APBD masih menjadi stimulus terendah dengan dampak sebesar 0,01% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 untuk setiap penambahan Rp1 triliun.

Sementara itu, dengan penambahan belanja sebesar 1% dari belanja pada triwulan tersebut, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi mampu didorong mencapai 5,07% (yoy) oleh belanja pegawai APBD dan belanja barang APBN. Dampak terendah diberikan oleh belanja bantuan sosial APBD, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001%. Dampak penambahan belanja sebesar Rp1 triliun atau 1% dari belanja pada triwulan IV 2022 terhadap pertumbuhan ekonomi ditampilkan pada Grafik 7.

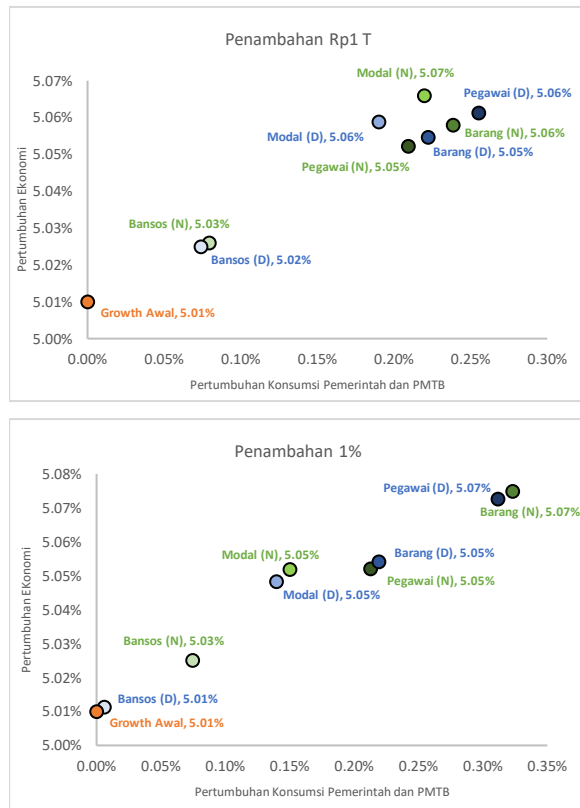
Berdasarkan hasil di atas, belanja modal APBN dan belanja modal APBD memberikan dampak yang relatif lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan jenis belanja lainnya. Selaras dengan temuan oleh Maryaningsih et al. (2014), Sinulingga (2015), Waryanto (2017), dan Wahyudi (2020).

Proyek-proyek skala besar dan strategis yang dibiayai oleh APBN akan mendorong peningkatan investasi. Hal tersebut menjadi *key instrument* pembangunan perekonomian Indonesia melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan per kapita, serta menurunkan tingkat kemiskinan (Panjaitan et al., 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahyudi (2020), bahwa efek multiplier atas penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah diberikan melalui penambahan kapasitas produksi, peningkatan konektivitas, mengurangi biaya produksi, serta mendorong munculnya pusat perekonomian baru. Maryaningsih et al. (2014) dan Sinulingga (2015) menjelaskan bahwa belanja modal mampu menstimulasi perekonomian melalui peningkatan konektivitas antar daerah, sehingga mendorong mobilitas masyarakat dan logistik serta mengurangi kesenjangan dan mendorong PDB per kapita dalam jangka panjang. Terlebih, belanja modal langsung yang bersifat produktif berdampak kepada peningkatan *output* di masa depan, sehingga memberikan *multiplier effect* yang lebih besar (Waryanto, 2017).

Belanja barang APBN juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pangestu (2018) menjelaskan bahwa belanja

Grafik 7 Dampak Penambahan per Jenis Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

barang yang tepat sasaran mampu mendorong pelayanan publik, sehingga berdampak kepada masyarakat dan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Dari sisi belanja daerah, satu alasan belanja pegawai APBD memiliki dampak yang tinggi terhadap konsumsi pemerintah adalah porsi belanja pegawai di daerah relatif lebih tinggi dibandingkan jenis belanja daerah lainnya, dan tingkat MPC pegawai Pemerintah Daerah yang relatif lebih tinggi dari pegawai swasta dalam *bracket income* yang sama. Selain sebagai komponen konsumsi pemerintah, peningkatan belanja pegawai akan berdampak kepada konsumsi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan belanja pegawai berdampak kepada peningkatan konsumsi barang dan jasa oleh pegawai. Dampaknya, peningkatan konsumsi akan berkontribusi terhadap naiknya PDB dan pertumbuhan ekonomi (Swaramarinda & Indriani, 2011). Kesimpulan tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Putri (2019), menemukan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak Percepatan Waktu Realisasi Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi belanja dapat dilakukan melalui pergeseran satu jenis belanja yang sama maupun antar jenis belanja. Pergeseran waktu belanja disimulasikan dari Triwulan IV ke Triwulan III 2022 dan dilakukan pada belanja barang, modal, dan bantuan sosial APBN dan APBD.

Pergeseran dari akhir Triwulan IV ke pertengahan Triwulan III 2022 memiliki dampak yang besar pada Triwulan III, dan dampak lanjutan yang relatif lebih kecil pada Triwulan IV 2022. Hal tersebut dikarenakan *multiplier effect* cenderung lebih besar pada putaran pertama dan kedua, lalu kemudian berangsur-angsur turun. Oleh karena itu, semakin cepat belanja direalisasikan, *multiplier effect* akan semakin besar di triwulan dan tahun anggaran berkenaan.

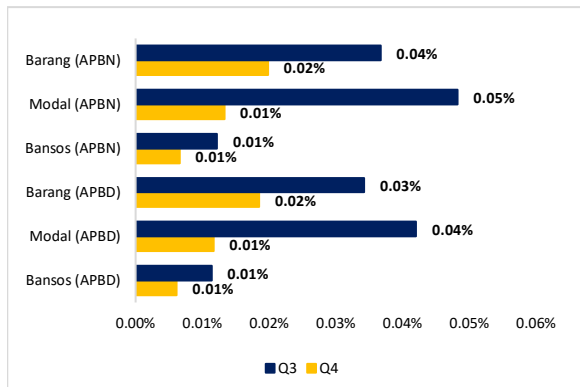
Pergeseran belanja barang APBN sebesar Rp1 triliun memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2022 sebesar 0,04%. Dampak pergeseran belanja pada Triwulan IV 2022 menyebabkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di triwulan berkenaan. Namun, dengan dampak lanjutan dari penambahan belanja di Triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2022 bertumbuh sebesar 0,02%.

Dampak tertinggi pergeseran satu jenis belanja yang sama dihasilkan oleh belanja modal APBN, sesuai dengan Grafik 8. Jika terdapat pergeseran belanja modal APBN sebesar Rp1 triliun dari akhir Triwulan IV 2022 ke pertengahan Triwulan III 2022, maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,05% untuk Triwulan III 2022 dan 0,01% untuk Triwulan IV 2022. Di sisi lain, dampak terendah dihasilkan oleh belanja bantuan sosial APBD dengan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2022 sebesar 0,01% dan Triwulan IV 2022 sebesar 0,01%.

Pergeseran antarjenis belanja APBN ditampilkan pada Grafik 9. Pergeseran belanja bantuan sosial APBN ke belanja modal APBN memberikan dampak yang paling besar dibandingkan dengan kombinasi pergeseran belanja lainnya. Pergeseran belanja bantuan sosial APBN sebesar Rp1 triliun di Triwulan IV 2022 ke belanja modal APBN di Triwulan III 2022 berdampak terhadap peningkatan 0,05% pada pertumbuhan perekonomian pada Triwulan III 2022 dan 0,04% pada Triwulan IV 2022.

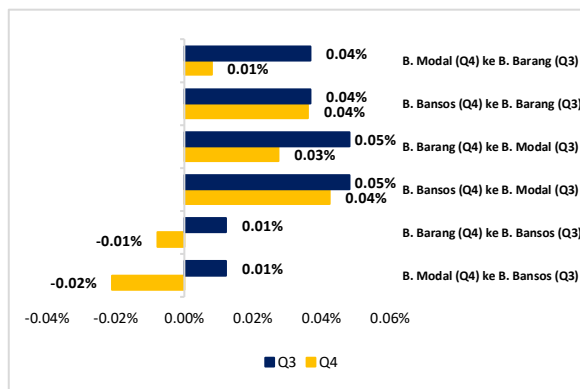
Di sisi lain, dampak terkecil diberikan oleh pergeseran belanja modal APBN sebesar Rp1 triliun di Triwulan IV 2022 ke belanja bantuan sosial APBN di Triwulan III 2022 dengan dampak sebesar 0,01% pada Triwulan III 2022, sedangkan dampak kontraktif pada triwulan IV 2022 sebesar 0,02%. Artinya, dampak pengurangan pada Triwulan IV 2022 belum seluruhnya dapat di-cover oleh *multiplier effect* lanjutan dari Triwulan III 2022.

Grafik 8 Dampak Pergeseran Satu Jenis Belanja yang Sama pada Triwulan III dan Triwulan IV 2022



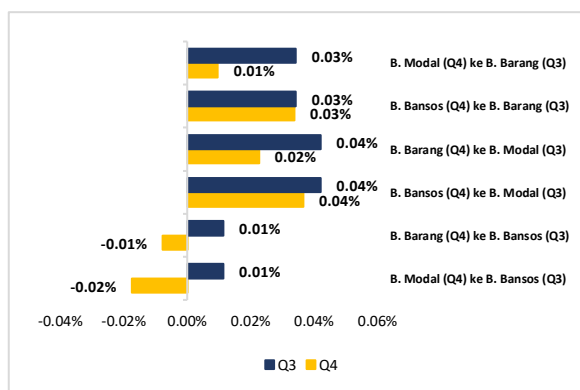
Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Grafik 9 Dampak Pergeseran Antar Jenis Belanja APBN pada Triwulan III dan Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Grafik 10 Dampak Pergeseran Antar Jenis Belanja APBD pada Triwulan III dan Triwulan IV 2022



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, 2023 (diolah)

Sebagaimana Grafik 10, pergeseran belanja bantuan sosial APBD sebesar Rp1 triliun di Triwulan IV 2022 ke belanja modal APBD di Triwulan III 2022 memberikan dampak peningkatan pertumbuhan perekonomian pada

Triwulan III 2022 sebesar 0,04% dan pada Triwulan IV 2022 sebesar 0,04%. Pergeseran belanja tersebut memberikan dampak paling besar dibandingkan dengan kombinasi pergeseran belanja lainnya, sejalan dengan pergeseran belanja APBN.

Sementara itu, pergeseran sebesar Rp1 triliun belanja modal APBD di Triwulan IV 2022 ke belanja bantuan sosial APBD di Triwulan III 2022 memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2022 sebesar 0,01%, sedangkan dampak kontraktif pada Triwulan IV 2022 sebesar 0,02%.

Jika dibandingkan dengan pergeseran belanja lainnya, pergeseran belanja bantuan sosial di Triwulan IV 2022 ke belanja modal di Triwulan III 2022 baik APBN maupun APBD memiliki dampak yang lebih tinggi karena belanja modal cenderung memberikan dampak lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal mampu mendorong investasi dan konsumsi pemerintah, sehingga *multiplier effect* bernilai lebih besar (Maryaningsih et al., 2014; Sinulingga, 2015; Waryanto, 2017; dan Wahyudi, 2020).

Belanja bantuan sosial memiliki dampak terhadap pendapatan masyarakat (Yasni & Yulianto, 2020). Belanja bantuan sosial merupakan bantalan sosial yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga kondisi masyarakat dari gejolak kondisi ekonomi maupun sosial.

Dengan memberikan bantuan sosial, pendapatan riil masyarakat akan meningkat. Peningkatan tersebut akan mendorong konsumsi masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Rahardja & Manurung (2008). Hal serupa disampaikan oleh Indrianawati & Soesatyo (2015) dan Ikram et al. (2015) bahwa tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, di mana setiap peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi. Dalam penelitiannya, Putra et al. (2015) mengungkapkan adanya hubungan positif antara bantuan sosial berupa bantuan ekonomi dan usaha, bantuan kelembagaan sosial budaya, serta bantuan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pergeseran belanja perlu diperhitungkan secara matang mengingat betapa strategisnya peran belanja bantuan sosial dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan berdasar kepada landasan teori dan pembuktian secara empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah mampu menstimulasi perekonomian Indonesia. Konsumsi pemerintah memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian yang bersifat *diminishing*, sehingga semakin cepat belanja pemerintah direalisasikan,

maka akan semakin cepat dan besar juga dampak *multiplier* terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pola belanja pemerintah yang masih menumpuk pada Triwulan IV perlu diakselerasi, utamanya ke Triwulan II dan III, sehingga manfaat keekonomiannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Akselerasi belanja pemerintah dapat difokuskan terhadap belanja modal karena memiliki pola penumpukan di Triwulan IV yang cenderung lebih besar dibandingkan belanja lainnya dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Peningkatan belanja modal APBN sebesar Rp1 triliun mampu mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi triwulan dengan rentang berkisar antara 0,05% - 0,06% (yoy). Pergeseran sebesar Rp1 triliun ke belanja modal APBN Triwulan III dari belanja bantuan sosial APBN Triwulan IV mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Triwulan III sebesar 0,05% dan pada Triwulan IV sebesar 0,04%. Namun, pergeseran belanja bantuan sosial ke belanja modal perlu diperhitungkan secara matang.

Atas kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1) melakukan reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan dampak akselerasi belanja terhadap perekonomian, khususnya pada belanja barang dan belanja modal, 2) *refocusing* evaluasi pelaksanaan anggaran dan optimalisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan serta meminimalisasi *idle cash* dan *cost of fund*, serta 3) penyederhanaan proses perencanaan dan penganggaran untuk mendorong penyerapan anggaran secara maksimal, utamanya pada awal tahun anggaran.

Meski demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu menggunakan asumsi perhitungan perputaran uang, angka MPC, dan angka MPS yang sama untuk setiap jenis belanja pada setiap triwulan. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperhatikan perhitungan perputaran uang, angka MPC, dan MPS, sehingga dapat lebih menggambarkan pola dan dampak pertumbuhan ekonomi di triwulan berkenaan.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pusat Statistik yang memberikan kontribusi dan saran perbaikan terhadap penulisan penelitian ini.

REFERENSI

- Afiftah, A. T., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2019). Analisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1988-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(1), 11-22. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i1>.
- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif: Studi komparasi antar provinsi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 44-57.
- Alfayuni, F., & Dahtiah, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran dan belanja modal (Studi kasus pada pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding the 12th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 12, 1121-1127.
- Azwar. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 150-167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Sistem neraca nasional 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk domestik bruto menurut pengeluaran 2017-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barro, R. J. (2009). Government spending is no free lunch. *The Wall Street Journal*.
- Boediono. (1998). *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Rebelo, S. (2011). When is the government spending multiplier large? *Journal of Political Economy*, 119(1), 78-121.
- Cwik, T. J., & Wieland, V. (2010). Keynesian government spending multipliers and spillovers in The Euro Area, *European Central Bank Working Paper Series No. 1267*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1705013>.
- Dahiri & Nasution, M. (2017). Analisis hubungan belanja pemerintah fungsi pariwisata terhadap produk domestik bruto regional (PDRB). *Jurnal Budget*, 2(1), 62-73.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fauzukhaq, M. F., Prasetya, L. D., & Akbar, A. (2019). Perputaran uang di Indonesia: Peran uang elektronik, volume transaksi elektronik, dan jumlah mesin EDC. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 79-88.
- Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 3(1), 34-41.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Z., Djambak, S., & Mukhlis. (2018). Dampak transaksi nontunai terhadap perputaran uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 44-55. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8877>.
- Hasnul, A. G. (2015). The effects of government expenditure on economic growth: The case of Malaysia. *MRPA Paper No. 71254*.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis pengaruh belanja pemerintah, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71-86. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4647>.
- Ikram, M., Sanusi A. M., & Ansar. (2015). Hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat konsumsi masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 27-36.
- Indrianawati, E., & Soesaty, Y. (2015). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan ekonomi terhadap tingkat konsumsi mahasiswa program pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 3(1), 214-226.
- Jannah, F., M. (2020). Peningkatan ekonomi di tengah pandemi dalam menunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1427-1432.
- Jiranyakul, K. (2007). The relation between government expenditure and economic growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 8(1).
- Joy, J. N., Okafor, M. C., & Nmesirionye, J. A. (2021). Impact of public capital expenditure on economy growth of Nigeria. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 2(4), 1-10. <https://doi.org/10.47616/jamrems.v2i4.173>.
- Kartiningrum E. D., Notobroto, H. B., Otok, B. W., Kumarijati, E. N., & Yuswatiningasih, E. (2022). *Aplikasi regresi dan korelasi dalam analisis data hasil penelitian*. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto.
- Kim, J., Wang, M., Park, D., & Petalcorin, C. C. (2021). Fiscal policy and economic growth: Some evidence from China. *Review of World Economics*, 157, 555-582. <https://doi.org/10.1007/s10290-021-00414-5>.
- Lahirushan, K. P. K. S., & Gunasekara, W. G. V. (2015). The impact of government expenditure on economic growth: A study of Asian Countries. *International Scholarly and Scientific Research and Innovation*, 9(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1338436>.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar ekonomi makro edisi ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maryaningsih, N., Hermansyah O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(1), 62-98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>.
- Mishkin, F. S. (2009). *Ekonomi uang, perbankan, dan pasar keuangan edisi kedelapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murshed, M., Mredula, F. A., & Tabassum, F. (2018). An empirical assessment of optimal government size and economic growth in light of the army curve: A panel data investigation. *World Review of Business Research*, 8(1), 161-173.
- Nasir, M., & Sari, D. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 93-104.
- Nur, M., & Naldi, N. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 27(1), 8-12.
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati W. (2019). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43-61.
- Pangestu, E. C. (2018). Pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 33-42. <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1113>.
- Pasaribu, E., & Septriani. (2020). Pengujian Wagner's Law versus Keynesian Hypothesis: Pendekatan regional Indonesia. *Convergence: The Journal of Economy Development*, 2(2), 181-193. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i2.14174>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 *Klasifikasi Anggaran*. 28 Agustus 2018. Jakarta.
- Purwadi, Ramadhan, P. S., & Safitri, N. (2019). Penerapan data mining untuk mengestimasi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode regresi linier berganda pada BPS Deli Serdang. *Jurnal Saintokom: Jurnal Sains, Manajemen Informatika, dan Komputer*, 18(1), 55-61. <https://doi.org/10.53513/jis.v18i1.104>.
- Putra, E. P., Purnamadewi, Y. L., & Sahara. (2015). Dampak program bantuan sosial terhadap

- pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten tertinggal di Indonesia. *Tataloka*, 17(3), 161-171. <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.3.161-171>
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori ekonomi makro: Suatu pengantar edisi keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramey, V. A. (2011). Identifying government spending shocks: It's all in the timing. *Quarterly Journal of Economics*, 126(1), 1-50.
- Romer, C., & Bernstein, J. (2009). *The job impact of the American recovery and reinvestment plan*.
- Sabila, T. M., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), 54-64.
- Shafuda, C. P. P. (2015). *An examination of the relationship between government spending and economic growth in Namibia*. (Tesis, Univeristy of Namibia, 2015).
- Sinulingga, W. (2015). Government expenditure and economic growth: An empirical study in Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 8(1), 41-52.
- Sriningsih, M., Hatidja, D., & Prang, J. D. (2018). Penanganan multikolinearitas dengan menggunakan analisis regresi komponen utama pada kasus impor beras di Provinsi Sulut. *Jurnal Ilmiah Sains*, 18(1), 18-24.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif cetakan ke-satu*. Bandung: Alfabeta.
- Sutawijaya, A., & Lestari, E. P. (2013). Penerapan metode vector auto regression dalam interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 66-77. <https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.151>.
- Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Econosains*. 9(2), 95-105, <https://doi.org/10.21009/econosains.0092.01>.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Tandiawan, E., Naukoko, A., & Wauran, P. (2015). Pengaruh investasi swasta dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kesempatan kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(1), 181-196.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran pemerintah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan: 103-113*. Pontianak, 2 Oktober 2020: Universitas Tanjungpura.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39-63. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819>.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itr-ev.v1i1.56>.